

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.1, Juni 2022

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 1 Juni 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Paisal, S.H.
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Zakiah, SE, Ak
- Editor/Penyunting** : Dr. Sabara, M. Phil. I
Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Sitti Arafah, S.Ag, M.A
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.i., M.Pd.I
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag.
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Darwis, S.Pd.I
Syamsuddin, SM
Sari Damayanti, S.H.
Rismawaty Rustam, SE
Nur Saripati Risca, S.Pd
Burhanuddin
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

SAPRILLAH
KESETARAAN GENDER ATAU KESEIMBANGAN GENDER?

Halaman: 1 - 9

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL
MENUJU FEMINISME NUSANTARA :
MENATA ULANG GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Halaman: 10 - 45

MIFTAHUS SURUR
FEMINISME NUSANTARA: MEMBINCANG TIGA PEREMPUAN
“PINGGIRAN”

Halaman: 46 - 62

ABD. KADIR AHMAD
PEREMPUAN SUFI DIBALIK HIJAB HEGEMONI LAKI-LAKI
(DALAM KARYA ULAMA ABAD KE-10/11 M)

Halaman: 63 - 87

SABARA
PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUKU KEI

Halaman: 88 - 111

SUBARMAN DAN SOPIAN TAMRIN
MELIHAT FEMINISME PADA SOSOK MANGKAU BESSE KAJUARA

Halaman: 112 - 135

MEGAWATI
PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR PENGGERAK: PERJUANGAN
PEREMPUAN KODINGARENG MELAWAN KORPORASI TAMBANG
PASIR LAUT

Halaman: 136 - 161

**BAHRUL AMSAL DAN RUKIANA NOVIANTI PUTRI
EKOFEMINISME ALA MASYARAKAT KAJANG: ILMU DAN AMALNYA**

Halaman: 162 - 188

**SITTI ARAFAH
PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK**

Halaman: 189 - 206

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
BERBAGI KUASA: KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA**

Halaman: 207 - 229

**AINUN JAMILAH
CADAR GARIS LUCU: GERAKAN MUSLIMAH ANTI KEKERASAN**

Halaman: 230 - 242

REVIEW BUKU

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA
FEMINISME ISLAM: GENEALOGI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI INDONESIA**

Halaman: 243 - 257

ARTIKEL UTAMA**MELIHAT FEMINISME PADA SOSOK MANGKAU BESSE KAJUARA****Subarman¹ dan Sopian Tamrin²**

Guru Sejarah SMKN 2 Bone

Dosen Fakultas Ilmu Sosial

E Mail : subarmansalim@gmail.comE Mail : sopiantamrin@unm.ac.id**Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai nilai-nilai feminisme dari sosok Raja Bone ke-28 yaitu Mangkau Besse Kajuara. Besse Kajuara (1858-1860) merupakan raja perempuan yang tegas menentang kolonialisme, dan terlibat perang terhadap pemerintah Hindia Belanda. Ketegasannya menolak pembaharuan Perjanjian Bongaya yang ditawarkan Hindia Belanda mempengaruhi peta politik pada masa itu. Hal tersebut bahkan kembali menyegarkan hubungan politik antar kerajaan lokal di kawasan Sulawesi di pertengahan abad ke-19. Kekalahan pasukan kerajaan Bone bersama koalisi (Suppa, Tanete) tidak lantas membuat sosok Besse Kajuara dikecilkan namanya. Ia tetap mengukir sejarah andil perempuan yang tegas melakukan perlawanan terhadap operasi kolonialisme oleh Hindia Belanda. Kehadiran beliau dalam konstelasi politik dan peperangan melawan penjajahan menunjukkan bahwa perempuan bugis tidak secara determinan menempatkan perempuan di ranah domestik semata. Melainkan memiliki peran strategis yang berpengaruh besar terhadap kondisi sosial masyarakat. Melalui perjuangannya, kita menemukan prototype emansipatoris perempuan yang apik dalam memadukan antara femininitas dan militansi. Besse kajuara sangat layak diangkat sebagai *role model* gerakan feminisme yang terbilang langka pada masanya, tidak hanya sebagai khazanah bagi masyarakat bugis melainkan nasional bahkan gerakan perempuan di dunia.

Kata kunci: Besse Kajuara, Bugis, Feminisme**PENDAHULUAN**

Pembahasan tentang perempuan dan perjuangan mewujudkan kesetaraan tidak pernah benar-benar selesai. Pada banyak tempat, perempuan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, mengalami pelecehan seksual, atau belum mendapatkan akses yang memadai dalam mengaktualisasikan dirinya di

ruang-ruang publik. Hal ini merupakan bentuk-bentuk pembatasan hak-hak perempuan dalam kuasa masyarakat patriarki.

Lebih jauh lagi dalam konstruksi masyarakat patriarki, hak-hak perempuan tidak hanya dibatasi, bahkan ditindas atas nama kodrat, tradisi atau agama.

Penindasan (terhadap perempuan) adalah pelanggaran nilai kemanusiaan yang universal dan akan tetap dan selalu menjadi bagian buruk dari kisah sejarah dan peradaban manusia. Karenanya, emansipasi perempuan, adalah gerakan yang membutuhkan lebih banyak dukungan, baik dalam bentuk kampanye juga dalam bentuk aksi nyata dalam program pengarusutamaan. Sayangnya, gerakan emansipasi perempuan masih mendapatkan benturan terutama dari aspek politik, budaya dan agama. Selain itu, gerakan emansipasi, masih terkesan eksklusif dan secara geografis, gerakan serta suara perjuangan kesetaraan perempuan masih belum bisa lepas dari stigma gerakan kota yang merupakan representasi budaya modern.

Karenanya, apa yang dibutuhkan dari gerakan feminisme adalah munculnya ide-ide yang lebih membumi, perlu kontekstualitas dalam membawa wacana kesetaraan perempuan. Nilai-nilai kultural, adat-tradisi, dan norma yang berkembang di tengah masyarakat perlu memberikan

respons, di antaranya dengan melakukan reproduksi gagasan sebagai upaya memperjuangkan kesetaraan perempuan. Hal ini penting, agar wacana feminisme tidak bergerak di ruang-ruang yang eksklusif atau terkesan hanya menjadi “gerakan impor” dari negara-negara Eropa.

Harus diakui, upaya mewujudkan kesetaraan gender lebih sering terkendala karena faktor yang politis. Dorongan partisipasi perempuan di dunia politik, dengan menetapkan afirmasi berupa kuota 30 persen dalam formasi calon legislatif setiap partai politik, salah satu yang menunjukkan peningkatan dalam hal penguatan emansipasi perempuan. Meskipun demikian, pemenuhan kuota tersebut masih membutuhkan proses penelitian lebih dalam terutama aspek kualitas, demi agar tidak menggiring perempuan terjebak pada isu feminis yang simbolis semata. Tentu dibutuhkan upaya lebih untuk menghadirkan produk regulasi yang tidak hanya bertujuan menjaga perempuan. Namun lebih jauh, produk regulasi benar-benar lahir dari

perspektif yang menempatkan perempuan sebagai subjek yang setara.

Ada hal-hal yang menyebabkan feminisme dianggap Barat dan asing dalam gerakan sosial dan ideologi di Indonesia. Pertama, ideologi feminisme tidak integral dalam sejarah Indonesia. Historiografi feminis belum ada, karena yang ada hanya sejarah tentang perempuan maskulin pemenang perang. Kedua, para ahli kurang mengutip tokoh-tokoh feminis di Indonesia. Ini menimbulkan ilusi bahwa feminisme memang sesuatu yang berasal dari luar. Ketiga, politik yang berkembang telah “membunuh” gerakan perempuan progresif dan menjadikan gerakan perempuan terjatuh dalam kerangka sosial daripada politik. Sementara, referensi utama ketika kita berbicara tentang tokoh pejuang perempuan, seakan belum mampu mengeksplorasi tokoh lain, selain Kartini. Padahal, dalam sejarah perjuangan menentang kolonialis juga diisi oleh daftar para pejuang perempuan. Eksplorasi tokoh perempuan lokal, penting untuk mendekatkan wacana feminisme agar lebih kontekstual dan memiliki akar

budaya yang kuat.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan mengenai mengapa masih ada persoalan adalah karena ide-ide atau pemikiran feminisme dan gerakan yang mengikutinya dianggap tidak memiliki akar budaya dan sosial pada masyarakat Indonesia, atau sebaliknya, ide-ide atau pemikiran tersebut berasal dari Barat atau memiliki konotasi Barat. (Arrivia dan Subono, 2017:6).

Feminisme sebagai gerakan kesetaraan perempuan telah berkontribusi besar bagi agenda perubahan sosial. Meski demikian, di Indonesia, feminisme tidak pernah lepas dari dinamika kelas sosial, masih berhadapan dengan persoalan ketimpangan relasi gender, dan secara terbuka mendapat penolakan keras dari kaum konservatif dan fundamentalis agama. Ditambah lagi, ada kekhawatiran terhadap kaum perempuan yang hidup di tengah masyarakat yang pernah mengalami penjajahan. Mereka akan mengalami penderitaan ganda, yakni penderitaan akibat struktur patriarki dan penderitaan akibat kolonialisme.

Dalam diskursus postkolonial, wacana feminisme masih menjadi persoalan krusial (Chandra, 2011) yang keberterimaannya masih belum sepenuhnya, karena faktor kultural dan politik.

Tulisan ini ingin melakukan kajian terhadap nilai-nilai feminisme yang berkembang di dalam masyarakat Bugis, lebih khusus pada sosok Mangkau¹ Besse Kajuara, raja Bone ke-28. Bagaimana Mangkau Besse Kajuara mampu berdiri tegak sebagai pemimpin perempuan yang tegas menentang kolonialisme, serta bagaimana sang ratu mengakomodir visi feminitas dalam strategi perang dan keputusan-keputusan politiknya, adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan coba ditemukan jawabannya dalam tulisan ini.

KRITIK FEMINISME

Tampaknya, membicarakan perempuan dalam konteks hari ini tidak lagi terbatas pada narasi bias gender atau topik kekerasan yang menyimpannya. Topik tentang perempuan seharusnya

tidak lagi dihantui dengan label *second sex*, sosok yang inferior dari laki-laki. Begitu juga dengan praanggapan tentang ciri feminin yang sering diasosiasikan sebagai pemalas, lemah, makhluk rapuh, dan cenderung mengedepankan sisi emosionalnya. Sisi feminin dan maskulin justru hadir di setiap personal. Seorang dalam bentuk dan kadar tertentu tentu memiliki cinta, kepedulian, dan pemeliharaan, hal-hal yang mencirikan sifat feminin.

Paradigma feminisme tahun 1980-an telah terbalik yaitu ingin memuji keunggulan kualitas feminin serta memaksimalkan perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan bahwa secara esensial memang berbeda, kalau sebelumnya kualitas feminin dianggap “inferior” sekarang bahkan dianggap “superior”. Para feminis tersebut mengajak para perempuan untuk melestarikan kualitas feminitas agar dunia menjadi lebih seimbang dan segala kerusakan yang terjadi dapat dikurangi. (Siti Fahimah, 2017:9)

Gerakan feminis perlu menemukan titik keseimbangan agar

¹Mangkau adalah gelar Raja Bone.

tidak menjadikan perempuan hanya sebagai objektifikasi, tanpa disertai kesadaran. Suwastini memandang bahwa konsep feminis telah mengalami redefinisi dan perubahan fokus, dan karena itu subjektifikasi perempuan diperlukan untuk menekankan aspek keperempuanan dari seorang perempuan, untuk membuat keputusan, menentukan pilihan, dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya (Swastini, 2013:204).

Gerakan feminisme tentu tidak berjalan tanpa kendala. Bahkan, dalam perspektif feminisme radikal, sebaliknya telah menghadirkan ketakutan, alih-alih kesetaraan dan mendorong kesejahteraan. Konsep kebebasan perempuan yang radikal pada titik tertentu akan membuat pria bebas dari beban dan tanggung jawabnya untuk memberi nafkah juga pemenuhan kesejahteraan istrinya (Ratna. 1996:13).

BUGIS DAN FEMINISME MULTIKULTURAL

Perkembangan feminisme paling tidak melahirkan tiga gelombang dengan berbagai aliran di dalamnya.

Keberadaan varian aliran feminisme menunjukkan bahwa pemikiran tentang perjuangan perempuan tidaklah tunggal. Kenyataan tersebut menjelaskan bahwa feminisme sebagai aliran bukanlah epistemologi tertutup. Dalam satu periode (gelombang) tertentu tidak muncul satu aliran semata. Pada periode pertama feminisme jelas muncul beberapa aliran seperti; Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Marxis-Sosialis, serta Feminisme Anarkisme. Periode Kedua; Ada Feminisme Psikoanalisis dan Feminisme Eksistensialis. Sedangkan periode ketiga; terdapat empat aliran pokok yakni Feminisme Postmodern, Feminisme Multikultural, Feminisme Global, dan Ekofeminisme (Tong, 2008)

Selain itu, Spelman (1988:11) bahwa teori feminis yang valid harus mempertimbangkan dengan serius perbedaan di antara perempuan. Sehingga feminisme tidak harus melakukan klaim bahwa semua perempuan sama. Oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam terminologi masyarakat Bugis memiliki konstruksi pandangan tersendiri dalam melihat

posisi perempuan. Terbukti bahwa kemunculan pemimpin perempuan dalam sejarah masyarakat bugis menunjukkan sistem sosial mereka bersifat terbuka. Kehadiran Besse Kajuara sebagai Ratu pada masanya menempatkan analisis feminisme multikultural yang mempertimbangkan kelas sosial (Kebangsawanan) sebagai modal yang bisa *enabling* untuk perjuangan perempuan. Oleh karena itu, tidak bisa digeneralisasi bahwa semua struktur itu bersifat opresif (mengekan) terhadap perempuan. Justru kelas sosial bagi perempuan sangat penting dalam keseluruhan kepentingan emansipasi. Semakin tinggi kelas sosial semakin baik pula untuk menggerakkan jaringan sosial dalam gerakan sosial politik.

Begitupun kondisi kultural, masyarakat bugis kaya akan khazanah pengetahuan tradisional. Pengetahuan itu bisa dijumpai melalui catatan sejarah atau praktik tutur yang masih hidup di tengah masyarakat. Misalnya pengetahuan tradisional yang terkandung dalam *Pappaseng* (Pesan) orang yang dituakan atau *To Macca* (Cendekia). Hal semacam ini bagi

Bourdieu (2010) menguatkan setiap aktor dalam melakukan praktik sosial. Terminologi Bugis dalam kerangka feminisme? Sebagaimana posisi epistemologi feminisme multikultural yang tidak pernah berseberangan dengan kondisi lokalitas. Sehingga Bugis tidak semata dipahami sebagai entitas geografis, melainkan sebagai khazanah kultural yang mengandung banyak pengetahuan yang akan menginspirasi gerakan perempuan, seperti *Pappaseng*.

Pappaseng sebagai referensi pengetahuan tradisional, banyak berisi terkait perempuan dan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Namun, sebagai produk manusia, *Pappaseng*, bukan tidak luput dari pandangan stereotip terhadap perempuan. Oleh karena itu, tulisan ini tidak mengafirmasi sepenuhnya nilai-nilai di dalamnya, terutama yang bersifat membatasi ruang keterlibatan perempuan pada kehidupan sosial-politik. Hal yang cenderung memosisikan rendah perempuan bisa ditemukan dalam *Pappaseng* dari Arung Bila di bawah ini:

Eppa'toi uwangenna orowane, nariaseng massipa' makkunrai tennaribilang orowane. Seuwani, makuttui. Maduanna, maleai. Matellunna, bongngo'i. Maeppa'na, bebe'i. 'Empat macam juga perbuatan laki-laki sehingga disebut bersifat perempuan. Tidak terhitung sebagai laki-laki. Pertama, malas. Kedua, lemah, rapuh. Ketiga, dungu. Keempat, bebal (Rahim, 2012:87).

Pappaseng dari Arung Bila ini bagaimanapun menunjukkan bahwa stereotip terhadap perempuan berpotensi hadir dan menguat di setiap jengkal kekuasaan. Artinya, perempuan dalam perspektif gender, tidak seharusnya dilekatkan dengan sebutan-sebutan yang diskriminatif dan justru lebih bermakna sebagai kekerasan terminologi.

Pernyataan ini secara tekstual bertujuan untuk memberikan arahan kepada kaum laki-laki. Namun secara tersirat sekaligus secara tradisional kaum perempuan dianggap kurang produktif apa lagi untuk mengurus hal-hal penting dari persoalan kerajaan.

Kata-kata seperti pemalas, lemah/rapuh, dungu, tentu saja merupakan anggapan yang secara tradisional dianggap lumrah. (Kesuma, 2019:323).

Dalam masyarakat Bugis, kepemimpinan tidak berhubungan dengan jenis kelamin. Begitu pula yang menjadi tradisi di dalam sistem kerajaan Bone. Perempuan memiliki peluang dan dipercaya mampu mengurus persoalan negara. Perempuan, bahkan menjadi raja bukan hal baru dan bukan pula sebuah tabu. Terkait kriteria dan sifat seorang pemimpin, *Kajao Laliddong* (penasehat raja) tidak menyebut persyaratan laki-laki atau hal-hal yang terkait dengan sifat maskulin. Menurutnya, sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yakni jujur sekaligus bertakwa, berkata benar dan mempunyai harga diri, memiliki harga diri disertai ketegasan, memiliki kecerdasan bersama kelapangan hati, punya keberanian disertai kasih sayang.²

²Permata bercahaya (dimaknai sifat) yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, menurut *Kajao Laliddong* yaitu: *lempu'e nasibawangi tau', ada tongengnge nasibawangi tike', siri'e*

nasibawangi getteng, akkalengnge nasibawangi nyamekkininnawa, awaraningeng nasibawai cirinna. (Hamid dkk, 2007: 41).

Perempuan memiliki peluang dan hak untuk hadir pada acara kerajaan. Mereka bisa duduk bersama dan sejajar dengan laki-laki, untuk membahas urusan kenegaraan. Perempuan dapat menduduki semua jabatan kenegaraan, bahkan termasuk menjadi raja. (Pelras, 2006: 189). Karenanya, meski tercitra sebagai bangsa yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, orang-orang Bugis sejatinya memiliki perspektif sendiri dan bahkan memberi penilaian istimewa pada sosok perempuan.

Jauh sebelum dunia Barat mempopulerkan istilah feminisme dan kesetaraan gender, perempuan dalam kultur patriarki Bugis mendapatkan tempat dan perlakuan istimewa. Keistimewaan ini mulai dari ranah domestik, pernikahan, hingga interaksi di lingkungan sosial. Gambaran uraian di atas juga menjelaskan bahwa posisi perempuan Bugis termasuk Besse Kajuara tidak sepenuhnya juga ditopang oleh modal sosial dan kultural. Melainkan sekaligus melakukan resistensi pada bagian tertentu seperti *Pappaseng* Arung Bila di atas. Namun, dari kondisi

itulah justru daya perlawanan itu menunjukkan bahwa Besse Kajuara seorang Feminis yang khas dalam sejarah di Indonesia. Dia berhadapan dua ancaman sekaligus, yakni kondisi kultural dan kondisi politik kolonial oleh Hindia Belanda.

KOSMOLOGI PEREMPUAN DAN TEKNONIM

Dalam tradisi Bugis, perempuan dipandang sebagai subjek yang kehadirannya adalah wujud keseimbangan kehidupan. Karenanya, perempuan memiliki banyak sebutan berdasarkan peran-peran sosialnya. *Ana' dara* adalah sebutan untuk gadis Bugis yang masih lajang, atau belum menikah. Panggilan tersebut mengindikasikan dua paduan kata '*ana*' (anak) dan *dara* (darah). Darah dimaknai simbol kemanusiaan dan sering diasosiasikan dengan jiwa.

Perempuan yang belum menikah dianggap suci, karena darah yang mengalir di dalam tubuhnya masih belum terkontaminasi atau tercampur. Pengertian belum terkontaminasi ini dapat dilihat dari tradisi keluarga Bugis yang selektif

dalam memilih calon pendamping bagi anak gadis mereka. Hal ini pula yang menyebabkan, mengapa keseriusan orangtua dalam menyeleksi calon pendamping bagi gadis mereka, lebih banyak tercipta sebagai upaya untuk menjaga nama baik, trah dan garis keturunan. Bahkan, pihak keluarga seringkali menggunakan persyaratan mahar yang tinggi untuk menyampaikan penolakannya. Dalam kosakata Bugis, istri memiliki pengertian *baine dan indo' ana*.

Dua kata ini masing-masing memiliki makna yang berbeda. Selain bermakna istri, *baine* juga berarti benih. *Baine* sebagai julukan terhadap perempuan yang telah bersuami, menunjukkan perempuan tersebut adalah cikal generasi penerus. Sebagai benih, ia mutlak mendapatkan perlakuan khusus, perhatian yang lebih dengan menjaganya sepenuh jiwa.

Pengertian benih bisa jadi adalah bentuk pengaruh dari kultur agraris. Harapannya, bahwa agar benih tumbuh dengan baik dan subur,

benih harus ditanam di tanah yang baik, tidak lupa untuk dipupuk dan disiram. *Baine* juga menunjukkan kualitas person, dianggap sebagai sosok yang terpilih. *Baine* adalah julukan yang secara implisit menjelaskan bahwa dia layak menjadi wadah lahirnya manusia baru. Sebutan lainnya bagi perempuan yang sudah berstatus istri dan memiliki anak adalah *Indo' ana* adalah gabungan kata '*indo*' dan '*ana*' yang secara terpisah berarti 'ibu' dan 'anak'. Makna tersebut bagi sang suami adalah bagaimana ia melihat dan memperlakukan istri sebagai seorang ibu yang penuh kasih, sekaligus sebagai ibu dari anak-anak mereka yang harus dilindungi dan dijaga.

Penyebutan *indo' ana* juga mengindikasikan tentang peran seorang perempuan yang sudah dewasa. Perempuan dewasa yang berstatus seorang istri, ia sekaligus mengemban peran sebagai ibu dari anaknya. Peran seorang ibu sangat menentukan tumbuh-kembang anak, yang kelak akan melanjutkan tradisi

dan peradaban. Sementara itu, dalam kajian kosmologi Bugis dalam La Galigo, perempuan digambarkan sebagai bumi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tiga tingkat kosmologi.

Dalam epik Bugis La Galigo, pernikahan kosmologis dapat dianalisis pada tiga tingkat: dunia atas atau langit (*Botting Langi*) sebagai suami; dunia tengah atau bumi (*Alé Lino/Kawa*) sebagai anak/dunia bawah, dan bumi (*Pérétiwi/ToddangToja/Uri 'Liu*) sebagai istri (Idrus, 2013, dalam <https://www.quareta.com/post/keistime-waan-perempuan-bugis>).

Berdasarkan kosmologi Bugis, ketiga tingkat dunia tersebut mencerminkan posisi seksual saat berhubungan badan, bersenggama. Pada prakteknya, ritual hubungan menggambarkan bagaimana posisi suami dan istri merepresentasikan posisi langit di atas dan menempatkan bumi pada posisi bawah. Artinya, selama hubungan seksual suami selayaknya berada di atas istri; sementara calon bayi ada di tengah,

karena saat istri hamil, posisi anak yang dihasilkan ada di tengah, atau dengan kata lain berada di antara calon ibu dan ayah. Pemahaman umum mengenai posisi suami yang berada di atas seringkali disebut juga sebagai pihak yang aktif. Sementara posisi istri yang di bawah disebut sebagai pihak yang pasif. Meski demikian, posisi pasif istri juga menandakan sebagai bentuk kontrol diri dan juga bagian dari upaya menjaga tata kesopanan. Lebih jauh, Idrus menguraikan, dalam tradisi Bugis, posisi tersebut justru dikaitkan dengan pemahaman terhadap reproduksi lokal. Hal ini diperkuat dengan anjuran '*indo botting*' (penasehat pernikahan) untuk meletakkan bantal di bawah bokong saat berhubungan dengan suami. Gaya dan perlakuan tersebut diyakini sebagai trik yang manjur agar istri lebih mudah hamil.

TEKNOMIM

Tumbuh dalam budaya patriarki-agraris, perempuan Bugis seringkali disebut memiliki peran dominan di dapur, sumur dan kasur. Namun, peran domestik tersebut tidak

berarti membuat hubungan suami-istri menjadi timpang. Misalnya, untuk urusan menggarap sawah bukan semata menjadi domain laki-laki, perempuan juga punya peran. Mulai dari tahap persiapan, proses tanam hingga panen padi. Istri turut membantu suami saat menyemai benih padi. Mereka juga membawakan makan siang saat sang suami berpeluh menanam padi. Hingga tiba masa panen, istri pun ikut ambil bagian untuk merontokkan bulir-bulir padi.

Memang, bahkan hingga di era saat ini, di momen makan keluarga, masih ditemukan keluarga yang mendahulukan laki-laki/suami untuk bersantap, sebelum ibu dan anak-anak. Tentu saja, kasus tersebut lebih dapat dilihat sebagai upaya untuk pengaturan jadwal, alih-alih menyebutnya sebagai ketimpangan hubungan. Kasus lain dalam ranah domestik, mungkin dapat menunjukkan sisi lain dari pembagian peran dalam hal pengadaan perhiasan, dan segala kelengkapan pesta mutlak dipersembahkan oleh sang suami untuk istri. Pembagian peran dan hubungan yang saling melengkapi dapat dilihat

dari pola keseharian di dalam rumah, maupun dalam kaitannya dengan status sosial di luar rumah. Jika untuk urusan dapur istri bertanggungjawab untuk menyajikan makanan lengkap di atas meja makan, sebaliknya, untuk urusan naik haji (selain bermakna ibadah, juga memiliki dimensi sosial), para istri selalu didahulukan. Umumnya, bagi seorang suami, jika belum bisa berangkat bersama untuk menunaikan ibadah haji, setidaknya sang istri yang didahulukan.

Kesetaraan hubungan juga dapat dilihat dari status pernikahan dan anak. Anak sebagai penerus keluarga adalah salah satu isu penting dalam setiap pernikahan. Pentingnya aspek regenerasi ini diwujudkan dalam penyebutan teknonim. Kedua orangtua memiliki pengakuan yang sama atas nama anak pertama, dengan menyandingkannya dalam penyebutan ibu dan bapak. Misalnya, jika anak pertama diberi nama La Baco, maka kedua orangtuanya sama dipanggil dengan sebutan bapak-nya La Baco dan ibu-nya La Baco.

BESSE KAJUARA MENOLAK PEMBAHARUAN KONTRAK BONGAYA

Kisah perang yang dipimpin oleh Besse Kajuara seakan membalikkan praanggapan selama ini tentang perang secara umum lebih sering dilihat dengan menggunakan kacamata maskulin: kuat, kekar, dan laki-laki. Sementara, perempuan nyaris tanpa tempat dalam narasi perang, selain di dapur, atau di balik bilik mengirim doa-doa. Besse Kajuara terlibat dalam perang yang sebelumnya telah ditabuh oleh sang suami La Parenrengi. Besse Kajuara bisa dikatakan sebagai sosok yang mampu meruntuhkan stigma perempuan yang hanya cakap pada ranah domestik. “Dia raja yang tidak hanya mendengar laporan. Dia ikut bersama rakyatnya dan bersama memegang senjata,”

“Belanda berpikir, raja perempuan akan lebih mudah diajak kerjasama dan dilunakkan,” kenyataannya, di luar dugaan, sang ratu lebih militan. Dalam beberapa perang, dia ikut berperang dengan menggunakan pakaian perang... “Besse Kajuara memerintahkan rakyatnya mencuri kuda

Mathhes, agar dia tidak bisa ke mana-mana... bayangkan Mathhes harus berjalan kaki hingga ke Camba [Maros]”. Kata Nurhayati Rahman, Guru Besar Filologi Universitas Hasanuddin, mengenai kiprah We Tenriawaru menjadi ratu Bone (<https://historia.id/politik/article/s/cara-raja-bone-melawan-belanda-v27RQ>).

Kenyataannya, We Tenriawaru Besse Kajuara memilih sikap sama seperti raja pendahulunya. Ia tetap konsisten menentang kedatangan atau upaya pemerintah Hindia Belanda. Hal tersebut dianggap melemahkan posisi kerajaan Bone melalui desakan untuk memperbaharui Perjanjian Bongaya. Sebelumnya, pihak La Parenrengi bahkan dengan lantang mengirim surat tantangan untuk berperang kepada Gubernur Hindia Belanda di Makassar. Perjanjian Bongaya ditandatangani pada 18 November 1667 sekaligus menjadi akhir dari perang yang melibatkan Gowa dengan Bone yang disokong oleh Belanda. Perjanjian Bongaya sekaligus menjadi akhir dari sebuah era kejayaan Gowa yang dipaksa tunduk dan mengakui 30 pasal yang secara nyata memberikan

kewenangan penuh atas Belanda, berikut daftar kerugian materil serta ganti rugi yang harus ditanggungnya. Sebaliknya bagi kerajaan Bone, makin menguatkan dukungan politik untuk menjadi penguasa yang hegemonik di Sulawesi Selatan. Keunggulan politik yang paling mencolok adalah Kerajaan Bone mampu mengontrol intensitas hubungan antar kerajaan lokal serta hubungannya dengan VOC- Hindia Belanda.³

Pembaharuan Perjanjian Bongaya sebenarnya merupakan dampak langsung dari kedatangan kembali Inggris menagih wilayah tanah jajahan ke Hindia Belanda. Hal ini tentu memberi konsekuensi bagi hubungan antar kerajaan lokal, juga terutama terhadap pemerintah Hindia Belanda.⁴ Kompeni Belanda mengajak kerajaan-kerajaan lokal untuk meninjau kembali isi perjanjian Bongaya. Rencana ini

tentu saja mendapatkan penentangan dari pihak Kerajaan Bone bersama Kerajaan Suppa dan Tanete. Dua kerajaan terakhir selanjutnya membantu perlawanan pasukan Bone dalam menghadapi serangan pasukan Hindia Belanda.

INTRIK PEREBUTAN TAHTA

Di awal jabatannya, Besse Kajuara berada dalam situasi intrik perebutan tahta, di sisi lain, dia harus berhadapan dengan konsekuensi dari pilihan politik sang suami yang tetap bertahan untuk tidak tunduk pada pemerintah kolonial. Pemerintah Hindia Belanda memahami posisi kerajaan Bone yang menjadi rujukan bagi kerajaan kawasan terutama dalam hal sikap politik. Tentu dalam kondisi demikian, dibutuhkan ketenangan pemimpin guna memahami situasi. Karena, jika respons terhadap konflik internal terlalu kuat, akan berpengaruh

³ Setelah Perjanjian Bongaya 1667, Kerajaan Bone secara *de facto* mejadi "imperium" Bugis, yang mampu mengontrol kerajaan-kerajaan kawasan. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kewenangan dan posisi sentral yang dimiliki Kerajaan Bone: pihak siapapun yang ingin menjalin hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda harus dengan izin

atau didampingi oleh pihak kerajaan Bone.

⁴ Ulasan mengenai dinamika hubungan dan peta politik kerajaan-kerajaan lokal di Sulawesi selama abad XVII sampai XIX lebih jauh dapat ditemukan dalam karya Mappangara (1996), Sahajuddin (2017) dan Poelinggomang, (2002 dan 2004)

terhadap lemahnya kedaulatan kerajaan. Menggantikan sang suami menjadi raja, tidak membuat posisi Besse Kajuara menjadi kuat secara politik. Bahkan, di internal elit kerajaan Bone, intrik politik mengiringi proses pelantikan dan perjalanannya menjadi raja ke-28. Konflik internal perebutan kuasa itu dicatat dalam *Lontaraq Akkarungeng* Bone:

Perubahan sikap politik Raja Bone yang demikian itu tidak disetujui oleh La Mappangara Arung Sinri, Menteri Dalam Negeri Bone. Oleh karena itu, La Mappangara Arung Sinri pergi ke Makassar untuk meminta perlindungan kepada Belanda. Dia pun bersama para pengawalnya diizinkan oleh Belanda untuk membuka satu perkampungan di Maros (*Lontaraq Akkarungeng* Bone, t.th.:157-158, dalam Abd. Latif, 2014:170).

Penentangan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Arung Sinri, tentu saja memberi angin segar bagi Belanda untuk meneruskan ambisinya melakukan penyerangan dan menuntaskan perlawanan Bone. Selanjutnya, Ahmad Singkeru Rukka memberi jalan mulus bagi masuknya

pasukan Belanda menyerbu ke pusat kerajaan setelah menduduki Bajoe.

Pada 28 November 1859, Belanda berhasil merebut Sinjai. Setelah itu pasukan ekspedisi menuju Bajoe dan berhasil merebut benteng pertahanan Bone di Bajoe pada 6 Desember 1859. Setelah menduduki Bajoe, pasukan ekspedisi dibantu oleh Ahmad Singkeru Rukka bergerak maju ke pusat kerajaan Bone. Pasukan Bone tidak dapat mempertahankan pusat kerajaan Bone, akhirnya membawa Ratu Bone mengungsi ke Pasempe (*Lontaraq Akkarungeng* Bone, t.th.:160 dalam Abd. Latif, 2014:171).

Besse Kajuara menyadari satu hal, bahwa elit kerajaan tidak sepenuhnya mendukung dirinya dan keputusannya menentang Belanda. Situasi ini tentu saja akan memberi peluang bagi Belanda untuk menanamkan pengaruhnya. Salah satu bangsawan tinggi dan cukup berpengaruh adalah Ahmad Singkeru Rukka, yang menunjukkan rasa tidak puas hati melihat Besse Kajuara

bertahta.⁵ Namun, pertentangan itu tidak membuat Besse Kajuara gelap mata. Oleh sang Ratu bersama Dewan Ade Pitu, justru Ahmad Singkeru Rukka diberi ampunan atas tindakannya yang membangkang terhadap kebijakan kerajaan.⁶ Sikap ini sesuai dengan *Pappaseng* Kajao Laliddong, yakni selain memiliki keberanian, pemimpin harus tetap menjaga tindakannya agar tetap rasional dan penuh pertimbangan.

STRATEGI MENAHAN GEMPURAN BELANDA

Kampanye perlawanan dilakukan oleh Besse Kajuara dilakukan tidak hanya dalam bentuk pengabaian terhadap ajakan berunding untuk merevisi perjanjian Bongaya, Besse Kajuara bahkan sudah

menyiapkan penyambutan pasukan Belanda. Salah satu yang paling menyita perhatian dan 'menampar' arogansi Belanda, ketika ratu memerintahkan semua kapal Belanda yang berlabuh di pelabuhan Bajoe untuk membalikkan benderanya.

Serangan dari pasukan Belanda akhirnya dilancarkan pada Januari 1859, yang datang dari dua arah yakni Sinjai dan Pelabuhan Bajoe. Berkat bantuan dari Ahmad Singkeru Rukka, kerajaan Bone gagal bertahan. Namun Belanda tidak mendapatkan apa-apa, karena sebelumnya para petinggi istana bersama sang ratu terlebih dahulu meninggalkan istana. Meski menduduki pusat kesultanan, namun penyerangan ini tetap oleh Belanda dianggap tidak sesuai harapan. Pasukan

⁵ Mengapa Ahmad Singkeru Rukka membantu Belanda untuk menyerang Bone? Sebetulnya, pada waktu La Parenrengi, Raja Bone ke-29, mangkat, maka Ahmad Singkeru Rukka sebagai iparnya memohon kepada Dewan Hadat Bone supaya melantik dirinya menjadi Raja Bone. Walau bagaimanapun, Dewan Hadat Bone telah mengetahui bahwa sepanjang kekuasaan La Parenrengi, maka Ahmad Singkeru Rukka senantiasa berpihak kepada Belanda. Itulah sebabnya, Dewan Hadat Bone melantik We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara untuk menggantikan suaminya

atau La Parenrengi (*Lontaraq Akkarungeng* Bone, t.th.:159-160 dalam Abd. Latif, 2014: 171)

⁶ Mappangara Suryadi. Ringkasan Disertasi. Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim, 1811-1946. Jurusan Sejarah, dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Desember 2010., Jurnal Masyarakat Indonesia, Edisi XXXVII, No.1, 2011. hal. 196

Belanda mengalami kondisi labil karena harus berhadapan dengan cuaca buruk juga mendapatkan serangan balasan dari pasukan Bone. Tidak butuh waktu lama, kondisi pasukan kolonial Belanda makin lemah, dan akhirnya terpaksa harus ditarik mundur kembali ke Makassar.

Pada 9 Desember 1859, pasukan ekspedisi Belanda yang di bawah pimpinan oleh Letnan Jenderal Van Swieten kembali diarahkan ke kerajaan Bone dengan jumlah pasukan yang lebih besar. Kali ini, Belanda datang dengan rencana yang lebih matang. Sebelum masuk ke Bone, mereka terlebih dahulu menyerang dan menguasai wilayah perbatasan bagian Selatan, yang merupakan kekuasaan Sinjai yakni Bulu-Bulu, Lamatti, dan Tondon. Penguasaan wilayah tersebut, menjadi langkah penting untuk serangan selanjutnya yakni kerajaan Bone.

Pasukan Kerajaan Bone tidak mampu membendung serangan pasukan Belanda. Akhirnya, We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara, dilarikan ke Pasempe. Lalu bersama

pasukannya untuk menghindari kejaran pasukan Belanda, sang ratu melarikan diri ke Ajatappareng di kampung Polejiwa. Di Polejiwa keadaan tidak menjadi lebih baik, sewaktu-waktu pasukan Belanda dapat muncul. Raja Sawitto La Cibu, yang juga merupakan Panglima Perang Bone, mengajak Ratu Bone agar segera meninggalkan Polejiwa. Ratu dipersilahkan memilih salah satu diantara tiga negeri untuk ditempati dan berkuasa di sana, yaitu Alitta, Suppa, dan Sawitto. We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara pun memilih Suppa, tetapi sebelum pergi ke Suppa dia meminta supaya anaknya yang bernama We Cella dilantik menjadi Ratu Alitta. Setelah itu, We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara pergi ke Suppa untuk menggantikan La Tenrilengka, Raja Suppa ke-19 (*Lontaraq Akkarungeng Alitta*, t.th.:37; *Lontaraq Akkarungeng Sawitto*, t.th.:32; dan *Lontaraq Akkarungeng Suppa*, t.th.:26-27, dalam Abd. Latif, 2014: 171-2) Sepeninggal Arumpone (Besse Kajuara), Ahmad Singkeru Rukka kemudian diangkat menjadi arumpone dan diberi gelar

Sultan Ahmad. Pengangkatan Ahmad Singkeru Rukka menggantikan We Tenriawaru Besse Kajuara, sekaligus menghadirkan periode baru dari hubungan Kerajaan Bone dengan Hindia Belanda setelah terlibat perang berkepanjangan sekitar 12 tahun.

PENUTUP

Besse Kajuara meninggal pada tahun 1862. Perjuangannya telah menghadirkan inspirasi bukan hanya bagi rakyat Bugis-Bone, namun ia juga layak tercatat sebagai tokoh perempuan di era kolonial yang pernah dimiliki oleh kerajaan Bone dan sejarah Nusantara. Kepemimpinan dan sikap tegas Besse Kajuara menunjukkan kualitas seorang pemimpin perempuan. Ia sama-sekali tidak gentar menghadapi gempuran pasukan Hindia Belanda. Besse Kajuara berhasil menerapkan strategi perang, menggalang koalisi dari kerajaan-kerajaan kawasan (Suppa dan Tanete). Sementara ia juga aktif merekrut perempuan untuk menjadi bagian dari pasukan perangnya.

Perjuangan Mangkau Besse Kajuara menentang kolonialis Belanda

adalah satu lasnskap kehadiran perempuan di ruang sosial politik di masa lalu. Hal tersebut sekaligus menegaskan ulang bahwa perempuan Bugis tidak terkekang kondisi sosial budaya. Perempuan bugis yang selama ini hanya dicitrakan sebagai sosok yang *'malebbi'* dan terkurung dalam arena domestik. Lebih dari itu tulisan ini menunjukkan bahwa perempuan dapat mengemban amanah untuk memimpin dan mengambil kebijakan terkait masa depan negara. Pelajaran penting bagi generasi hari ini adalah bagaimana mampu keluar dari bingkai stereotip bias gender, melawan segala bentuk diskriminasi untuk selanjutnya berkiprah di berbagai bidang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Latif. 2014. "Diplomasi dan Ekspedisi Militer Belanda terhadap Tiga Kerajaan Lokal di Sulawesi Selatan, 1824-1860." *Sosio Humanika.*, 7 (2): (159-73)
- Arrivia, Gadis dan Nur Iman Subono. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia*. Jakarta: Preiderich Ebert Stiftung.
- Bourdieu, Pierre. 2010. *Arena Produksi Kultural*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Candra, Priskardus Hermanto. 2019.

- 'Kritik Feminisme Postkolonial Untuk Membongkar Kultur Patriarki Dalam Budaya Manggarai.' *Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11 (1): 107-16
- Fahimah, Sutu 2017. "Ekofeminisme: Teori dan Gerakan." *Alamtara* 1 (1): 6-19
- Hamid Abu, dkk. 2007. *Sejarah Bone*. Watampone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2003. 'Marriage, Sexuality and Reproduction: The Myth and the Reality of La Galigo Epic'. Paper. Department of Anthropology, Fisip – Unhas, Makassar, Indonesia.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2001. "Marriage, Sex and Violence." dalam Susan Blackburn (ed.), *Love, Sex and Power: Women in Southeast Asia*. Monash Asia Institute, Clayton, 43-56
- Kesuma, Andi Ima dan Irwan. 2019. Prosiding Seminar Nasional LP2M UNM – 2019. *Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Hal. 320-328
- Mappangara, Suriadi. (1996). 'Kerajaan Bone Abad XIX: Konflik Kerajaan Bone – Belanda, 1816 – 1860'. Tesis Magister Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM [Universitas Gadjah Mada].
- _____. Ringkasan Disertasi. 'Bertahannya Bangsawan Bone di Tengah Perubahan Rezim, 1811-1946'. Jurusan Sejarah, dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, pada tanggal 28 Desember 2010. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVII, No.1, 2011. hal. 185-210
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- _____. 2004. *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906- 1942*. Yogyakarta: Ombak
- Rahim, Abdul. 2012. *Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar*. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Disbudpar Sulsel.
- Ratna Megawangi, 1996. "Perkembangan Teori Feminisme Masa Kini dan Mendatang Serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman." *Tarjih*, edisi ke-I Desember 1996: 12-21.
- Ruth Indiah, dkk. 2019. *Tuhan, Perempuan dan Pasar*. Yogyakarta: Indoprogres.
- Sahajuddin. 2017. "Akhir Persekutuan Belanda Dengan Kerajaan Bone Abad XIX." *Walusuji*. 8 (1): 57-70
- Spelman, Elizabeth. 1988. *Inessential Women: Problem of Exclusion in Feminist Thought*. Boston: Beacon Press.

- Suwastini, Ni Komang Arie. 2013. "Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis/" *Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (1). 2022
<https://islami.co/hikayat-ratu-bone-yang-memutus-stigma-perempuan-membuat-penjajah-belanda-kewalahan/>, diakses tanggal 17 April 2022
- Tong, Rosemarie Putnam. 2008. *Feminist Thought*, Yogyakarta: Jalasutra.
<https://www.quireta.com/post/keistimewaan-perempuan-bugis>, diakses tanggal 20 April 2022
- <https://historia.id/politik/articles/cara-raja-bone-melawan-belanda-v27RQ>, diakses tanggal 17 April 2022
- <https://attoriolong.com/2019/11/rumpuna-bone-perang-antara-bone-dengan-belanda-1859-1860/>, diakses tanggal 27 April 2022
- <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/apa-yang-perlu-diketahui-tentang-dasar-dasar-feminisme-bagian-2-selesai>, diakses tanggal 20 April 2022

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelar akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawahi, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.